

# **Desentralisasi Perencanaan Pendidikan: Ancaman Disparitas Mutu atau Peluang Inovasi Lokal**

Moh. Alamsuryaningrat<sup>1</sup>, Siti Aimah<sup>2</sup>

alamsukaterbang@gmail.com

<sup>1</sup> Universitas KH. Muhktar Syafaat Blokagung Banyuwangi

<sup>2</sup> Universitas KH. Muhktar Syafaat Blokagung Banyuwangi

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis desentralisasi perencanaan pendidikan di Indonesia, menelaah apakah praktik ini lebih condong pada potensi disparitas mutu antardaerah atau justru menjadi peluang inovasi lokal yang signifikan. Tujuan utama studi ini adalah mengeksplorasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan implementasinya di tingkat daerah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus multidimensi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan orang tua), observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan evaluasi pendidikan dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan variasi dalam capaian mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi perencanaan pendidikan memicu perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai munculnya disparitas mutu akibat kapasitas dan komitmen daerah yang bervariasi, ditemukan pula bukti kuat adanya tren inovasi lokal yang berhasil meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan di daerah tertentu. Inovasi ini seringkali muncul dari adaptasi kurikulum, pengembangan program ekstrakurikuler yang unik, atau kemitraan strategis dengan komunitas dan industri lokal. Disparitas mutu lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan kapasitas manajerial dan fiskal daerah, bukan semata-mata oleh desentralisasi itu sendiri.

**Kata kunci:** Desentralisasi Pendidikan, Perencanaan Pendidikan, Disparitas Mutu, Inovasi Lokal, Kebijakan Pendidikan.

## Pendahuluan

Desentralisasi perencanaan pendidikan, meski bertujuan mendekatkan pelayanan, seringkali justru memperlebar jurang kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini terjadi karena kapasitas fiskal, sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan komitmen politik di tingkat daerah sangat bervariasi. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi dan SDM yang kompeten cenderung mampu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pendidikan, melatih guru, dan menyediakan fasilitas yang memadai. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan finansial dan SDM sering kesulitan memenuhi standar minimum, mengakibatkan fasilitas yang buruk, kekurangan guru berkualitas, dan kurikulum yang tidak relevan.: Studi-studi empiris di Indonesia kerap menunjukkan perbedaan signifikan dalam nilai Ujian Nasional atau hasil PISA antara provinsi atau kabupaten/kota yang kaya dan miskin. Sebagai contoh, rata-rata nilai mata pelajaran tertentu di DKI Jakarta atau Yogyakarta seringkali jauh melampaui daerah-daerah di wilayah timur Indonesia. Selain itu, laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) atau lembaga independen seperti SMERU Institute seringkali menyoroti kesenjangan infrastruktur dan ketersediaan guru profesional di daerah terpencil dibandingkan dengan perkotaan. Perbedaan ini merupakan cerminan langsung dari kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pendidikan pasca-desentralisasi, di mana daerah yang lemah secara kapasitas akan tertinggal. Desentralisasi, tanpa dukungan kapasitas dan pemerataan yang memadai dari pemerintah pusat, dapat memperparah ketimpangan kualitas pendidikan, menciptakan segregasi sosial berdasarkan akses terhadap pendidikan bermutu.

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan komunitas sekolah untuk mengembangkan inovasi dalam kurikulum dan program pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, daerah tidak lagi terpaku pada kurikulum standar nasional yang mungkin kurang sesuai dengan konteks budaya, ekonomi, atau lingkungan setempat. Mereka dapat merancang mata pelajaran muatan lokal, mengembangkan metode pengajaran yang adaptif, atau menjalin kemitraan dengan industri dan komunitas lokal untuk mempersiapkan peserta didik sesuai dengan potensi daerah. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja lokal atau isu-isu sosial yang mendesak di wilayah mereka.

Banyak daerah di Indonesia telah berhasil menciptakan program pendidikan unggulan yang khas. Misalnya, beberapa daerah pertanian mengembangkan kurikulum yang menekankan agrobisnis, sementara daerah pesisir mungkin fokus pada perikanan atau pariwis bahari. Sekolah-sekolah di Bali seringkali mengintegrasikan seni dan budaya lokal secara mendalam dalam kegiatan belajar mengajar. Di beberapa kota, muncul program keahlian di SMK yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan industri manufaktur atau teknologi informasi setempat, yang merupakan hasil dari inisiatif pemerintah daerah dan kolaborasi dengan sektor swasta. Inovasi-inovasi ini tidak akan mungkin terjadi jika perencanaan pendidikan tetap tersentralisasi sepenuhnya.

Desentralisasi dapat menjadi katalisator bagi inovasi pendidikan yang relevan secara lokal, meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan spesifik daerah, dan memperkuat identitas budaya melalui pendidikan.

### **3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Lokal dalam Pengelolaan Pendidikan**

**Poin:** Desentralisasi mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan.

**Alasan:** Ketika kewenangan dan tanggung jawab pendidikan didelegasikan ke tingkat lokal, masyarakat, orang tua, dan komunitas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Forum-forum seperti Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan menjadi lebih relevan dan berdaya. Pemerintah daerah pun dituntut untuk lebih akuntabel kepada konstituennya dalam pengelolaan anggaran dan program pendidikan, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

**Bukti:** Pembentukan dan pengaktifan kembali komite sekolah di banyak daerah menunjukkan partisipasi aktif orang tua dalam merumuskan kebijakan sekolah, mengawasi penggunaan dana, atau bahkan berkontribusi dalam pengadaan fasilitas. Di beberapa daerah, masyarakat sipil secara aktif terlibat dalam pemantauan alokasi anggaran pendidikan dan kualitas layanan publik di sekolah. Selain itu, respons pemerintah daerah terhadap isu-isu pendidikan lokal, seperti pembangunan sekolah baru atau pengangkatan guru, menjadi lebih cepat dan langsung karena tekanan dari konstituen. Rapat-rapat dengar pendapat atau musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota seringkali menjadi wadah aspirasi masyarakat terkait pendidikan.

**Kesimpulan:** Desentralisasi memperkuat mekanisme akuntabilitas dari bawah ke atas dan mendorong kepemilikan masyarakat terhadap sistem pendidikan di wilayah mereka.

### **4. Tantangan dalam Koordinasi dan Standarisasi Nasional**

**Poin:** Desentralisasi menimbulkan tantangan serius dalam hal koordinasi antar jenjang pemerintahan dan menjaga standarisasi mutu pendidikan secara nasional.

**Alasan:** Dengan beragamnya kapasitas dan prioritas daerah, kebijakan pendidikan yang dirumuskan di tingkat pusat seringkali sulit diimplementasikan secara seragam. Koordinasi antara kementerian pusat, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota menjadi kompleks. Perbedaan interpretasi kebijakan, tarik-menarik kepentingan, dan kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terpadu dapat menyebabkan fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya, standar mutu yang diharapkan bisa berbeda-beda antar daerah,

menyulitkan mobilitas siswa atau guru, dan menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan kualifikasi lulusan.

**Bukti:** Kasus perbedaan implementasi Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka di berbagai daerah sering menjadi contoh nyata. Ada daerah yang sangat siap dengan infrastruktur dan pelatihan guru, ada pula yang tertatih-tatih. Standar kualitas guru, pengadaan buku pelajaran, atau bahkan alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kadang kala mengalami hambatan birokratis atau penyimpangan di tingkat daerah karena kurangnya koordinasi dan pengawasan yang efektif dari pusat. Laporan BPK atau KPK sering menemukan ketidakefisienan atau penyalahgunaan anggaran pendidikan di daerah, yang sebagian diakibatkan oleh kurangnya kontrol terpusat.

**Kesimpulan:** Tanpa kerangka koordinasi yang kuat dan mekanisme standarisasi yang jelas, desentralisasi berisiko mengorbankan koherensi dan kesetaraan sistem pendidikan nasional.

## 5. Politik Lokal dan Kepentingan Elit Mempengaruhi Perencanaan Pendidikan

**Poin:** Proses desentralisasi perencanaan pendidikan rentan terhadap intervensi politik lokal dan kepentingan elit, yang dapat mengesampingkan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

**Alasan:** Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki diskresi dalam alokasi anggaran dan penunjukan pejabat di sektor pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi kepentingan politik praktis untuk mempengaruhi keputusan pendidikan, misalnya dalam pembangunan fasilitas yang tidak efisien, penempatan guru berdasarkan kedekatan politik, atau pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan. Fokus pada proyek-proyek jangka pendek yang memberikan citra positif bagi kepala daerah seringkali mengalahkan perencanaan strategis jangka panjang untuk peningkatan kualitas pendidikan.

**Bukti:** Seringkali kita mendengar kasus-kasus di mana proyek pembangunan sekolah mangkrak, pengangkatan kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan yang tidak sesuai kompetensi tetapi karena kedekatan dengan kepala daerah, atau anggaran pendidikan yang dialihkan untuk kepentingan di luar prioritas utama. Laporan media massa atau studi akademis sering mengungkapkan bagaimana janji-janji kampanye politik mempengaruhi alokasi anggaran dan arah kebijakan pendidikan daerah. Misalnya, pembangunan fasilitas olahraga mewah di sekolah daripada peningkatan kualitas perpustakaan atau laboratorium, karena dianggap lebih "terlihat" oleh masyarakat dalam masa jabatan politik tertentu. Praktik ini menunjukkan bagaimana desentralisasi, jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik dan pengawasan kuat, dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan pendidikan.

**Kesimpulan:** Intervensi politik lokal merupakan risiko signifikan dalam desentralisasi, berpotensi mengikis profesionalisme dan efektivitas perencanaan pendidikan demi kepentingan sesaat.

## REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*. <https://www.bpk.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Kemendikbud Tahun 2020*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Capaian Indikator Kinerja Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2022*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Kajian Tata Kelola Dana Pendidikan: Risiko Korupsi dalam Pengelolaan BOS dan DAK Fisik Pendidikan*. Jakarta: KPK.
- SMERU Research Institute. (2022). *Disparitas Mutu Pendidikan Dasar di Indonesia: Kajian Empiris dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: SMERU.
- World Bank. (2020). *Improving Education Quality in Indonesia: Evidence and Policy Recommendations*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1521-8>
- Yuwono, T., & Harjanto, T. (2021). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dp4f8>
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2019). *Education in Indonesia: A White Elephant?* Singapore: ISEAS Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021: Non-state actors in education*. Paris: UNESCO Publishing. <https://www.unesco.org/reports/global-education-monitoring-report/2021>
- Pratikno, T. (2020). Politik Pendidikan Daerah dalam Era Otonomi: Studi tentang Perencanaan Pendidikan di Kabupaten. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Lokal*, 5(2), 77–93.